

Analisis Komparatif Pemikiran Fiskal Abu Yusuf dan Kebijakan Fiskal Keynesian dalam Konteks Ekonomi Kontemporer

Fenti Indah Kusumorini

Universitas Islam Negeri Salatiga

Fenti.kusumorini@gmail.com

Abstrak

Pemikiran fiskal modern tidak terlepas dari kontribusi tokoh lintas peradaban, termasuk pemikir ekonomi Islam klasik seperti Abu Yusuf melalui karyanya *Kitāb al-Kharāj*. Abu Yūsuf memandang kebijakan fiskal sebagai instrumen etis untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan umum, dan keberlanjutan fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran fiskal Abu Yusuf serta membandingkannya dengan pendekatan Keynesian dalam konteks kebijakan fiskal modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Abu Yusuf menekankan penguatan pendapatan negara melalui sistem perpajakan yang adil, proporsional, serta pengelolaan keuangan publik yang amanah dan akuntabel. Sementara itu, pendekatan Keynesian lebih menitikberatkan pada peran aktif negara dalam stabilisasi ekonomi jangka pendek melalui ekspansi belanja publik. Perbedaan utama kedua pendekatan terletak pada landasan normatif, di mana pemikiran Abu Yusuf berakar pada *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan keadilan distributif dan kemaslahatan jangka panjang. Temuan ini berkontribusi dengan menempatkan pemikiran fiskal Abu Yusuf sebagai kerangka normatif-etis untuk mengevaluasi kebijakan fiskal kontemporer. Secara praktis, kerangka ini relevan sebagai basis penilaian kebijakan fiskal modern, khususnya dalam isu distribusi fiskal, tata kelola keuangan publik, dan keberlanjutan fiskal di negara berkembang seperti Indonesia.

Kata Kunci

Abu Yusuf; Kebijakan Fiskal; Maqāṣid al-Sharī'ah; Etika Fiskal; Kerangka Normatif

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern tidak lepas dari kontribusi para pemikir lintas peradaban, termasuk tradisi intelektual Islam pada masa klasik. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Yusuf (731–798 M), murid utama Abu Hānīfah sekaligus salah satu tokoh hukum terkemuka pada masa Abbasiyah (Maruta 2013). Melalui karya monumentalnya, *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf merumuskan berbagai prinsip keuangan publik dan perpajakan berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Karya Abu Yusuf tersebut menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama kebijakan fiskal di antaranya melalui sistem perpajakan yang proporsional (*muqasamah*), serta mekanisme pengelolaan pendapatan negara yang adil dan tidak membebani rakyat terlalu berat (Hamka-Hamka dkk. 2024).

Di sisi lain, pemikiran ekonomi modern juga dipengaruhi oleh John Maynard Keynes (1883–1946), ekonom Inggris yang melalui karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) yang merevolusi pemahaman makroekonomi dan peran negara dalam perekonomian. Keynes menawarkan kerangka baru dalam memahami peran negara dalam menstabilkan perekonomian, khususnya melalui intervensi fiskal (Aisyah Dita Rizkia 2025.; Bakir 2023). Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pemikiran Abu Yusuf dalam konteks ekonomi Islam maupun teori Keynes dalam kerangka ekonomi modern. Namun, kajian-

kajian tersebut umumnya dilakukan secara parsial, deskriptif, atau terpisah, tanpa menempatkan kedua pemikiran tersebut dalam satu kerangka analisis kebijakan fiskal yang komparatif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini berisi analisis komparatif yang menempatkan pemikiran Abu Yusuf dan John Maynard Keynes dalam satu kerangka kebijakan fiskal. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai etika fiskal Islam klasik yang dirumuskan oleh Abu Yusuf, seperti keadilan distributif, perlindungan terhadap rakyat, dan tanggung jawab moral negara dengan instrumen kebijakan fiskal Keynes yang bersifat analitis dan makroekonomis.

Meskipun integrasi nilai etika fiskal Islam dengan instrumen analitis Keynesian belum dilakukan secara sistematis, urgensi integrasi ini meningkat dalam konteks defisit fiskal struktural dan ketimpangan distribusi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan: bagaimana pemikiran Abu Yusuf dapat berfungsi sebagai kerangka evaluatif normatif dalam menilai implementasi fiskal Keynesian pada ekonomi kontemporer?

LANDASAN TEORI

Prinsip Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal dipahami sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan publik. Kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi mengelola pendapatan dan belanja negara, tetapi juga memastikan distribusi sumber daya yang adil, perlindungan kelompok rentan, serta pencegahan praktik kezaliman. Negara merupakan pengelola amanah melalui institusi Baitul Māl, sehingga pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas (Chapra 2008; Islahi 2005).

Pendapatan negara bersumber dari instrumen yang sah dan berkeadilan, seperti zakat, kharāj, jizyah, fai', dan pengelolaan aset publik. Sementara itu, belanja negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Keabsahan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur dari efektivitas ekonomi, tetapi juga dari dimensi etika dan keadilan dalam pelaksanaannya (Huda dan Muti 2011; Zuhayli 2010).

Penguasa bukan pemilik kekayaan negara, melainkan pemegang amanah yang wajib mengelola keuangan publik secara adil dan proporsional. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam memiliki dimensi normatif yang kuat dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. (Abu Yusuf. 1979; Huda dan Muti 2011; Islahi 2015).

Biografi Abu Yusuf

Abu Yusuf (Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari) lahir di Kufah pada tahun 113 H/731 M dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H/798 M. Ia merupakan murid utama Imam Abu Hanifah dan dikenal sebagai ahli fikih terkemuka mazhab Hanafi. Pada masa Khalifah Harun al-Rashid, Abu Yusuf diangkat sebagai Qādī al-Quḍāt, jabatan tertinggi dalam sistem peradilan Islam yang memberinya pengaruh besar dalam penerapan hukum dan kebijakan ekonomi negara (Nurseha 2018).

Berasal dari keluarga sederhana, Abu Yusuf menempuh pendidikan dengan dukungan Abu Hanifah dan belajar dari sejumlah ulama besar di Kufah, pusat intelektual Islam yang penting pada masa itu. Momen penting dalam hidupnya adalah ketika ia menjadi murid utama Imam Abu Hanifah selama sekitar 17 tahun. Pengalaman akademiknya membentuk pandangannya dalam bidang hukum, administrasi, dan keuangan publik. (Al-Khatib al-Baghdadi 2002).

Abu Yusuf hidup pada masa transisi penting dalam sejarah Islam, yakni runtuhnya Dinasti Umayyah dan berdirinya Dinasti Abbasiyah pada pertengahan abad ke-8 M. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, ia diangkat sebagai Qādī al-Quḍāt, sebuah jabatan yang pertama kali dilembagakan dalam sejarah Islam. Pandangannya mengenai kharāj dan keuangan publik

kemudian dihimpun dalam Kitāb al-Kharāj, yang menjadi rujukan penting administrasi fiskal Abbasiyah (Abu Yusuf. 1979; Al-Khatib al-Baghdadi 2002; Islahi 2015)

Selain kitab Al Kharaj, Abu Yusuf menghasilkan sejumlah karya penting, antara lain Kitāb al-Atsar, Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa Ibn Abī Lailā, dan Adab al-Qādī (Huda dan Muti 2011). Dalam penelitian ini, fokus utama adalah Kitāb al-Kharāj, karya yang paling komprehensif dalam membahas keuangan negara, perpajakan, pengelolaan tanah, dan administrasi publik. Keahlian Abu Yusuf dalam fikih, peradilan, dan administrasi keuangan menjadikannya salah satu tokoh utama dalam perkembangan mazhab Hanafi dan tokoh pemikir ekonomi Islam klasik, dan kontribusinya masih relevan hingga masa modern (Abu Yusuf. 1979; Islahi 1988).

Kitāb al-Kharāj ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rashid, kitab ini memuat prinsip-prinsip keadilan fiskal, larangan pajak zalim, perlindungan rakyat kecil, serta peran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kitāb al-Kharāj dianggap sebagai risalah awal ekonomi publik dalam sejarah Islam (Abu Yusuf. 1979; Al-Khatib al-Baghdadi 2002; Calder 1993; Hallaq 1997; Islahi 2015; Zuhayli 2010).

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj

1. Kebijakan Fiskal dan Perpajakan

Kebijakan fiskal negara harus bersumber dari penerimaan yang sah dan dikelola secara adil melalui instrumen seperti kharāj, jizyah, fai', ghanimah, 'usyr, dan zakat. Gagasan sentralnya adalah reformasi sistem kharāj, dengan menolak pajak tetap (misāḥah) dan menggantinya dengan pajak proporsional (muqāsamah) berdasarkan hasil panen, yang dinilai lebih adil dan produktif.

Penguasa merupakan pemegang amanah Baitul Māl, bukan pemilik kekayaan negara, sehingga kebijakan fiskal harus berorientasi pada keadilan distributif dan kesejahteraan publik (Martina Nofra Tilopa 2017).

2. Peran Negara untuk Perekonomian

Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat melalui pengeluaran publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum, seperti infrastruktur, keamanan, dan sistem peradilan. Abu Yusuf juga menekankan pentingnya jaminan kesejahteraan aparat negara dan tentara agar distribusi kekayaan berlangsung secara adil dan stabil (Abu Yusuf. 1979; Chapra 2008; Islahi 2015).

3. Kebijakan Harga dan Pasar Bebas

Abu Yusuf menolak penetapan harga oleh negara dan mendukung mekanisme pasar yang alami, namun, intervensi pemerintah secara terbatas dibenarkan dalam kondisi krisis untuk pengawasan, mencegah monopoli, penimbunan, kecurangan dan menjaga keadilan pasar (Abu Yusuf. 1979; Chapra 1992; Islahi 2015).

4. Optimalisasi Aset (tanah)

Tanah yang tidak dikelola dapat ditarik negara dan diberikan kepada pihak yang mampu mengelolanya demi kemaslahatan bersama. (Abu Yusuf. 1979; Islahi 2005).

Pemikiran Tokoh Ekonomi Konvensional John Maynard Keynes

Pemikiran John Maynard Keynes berkembang sebagai respons terhadap krisis ekonomi besar 1930-an yang tidak mampu dijelaskan oleh teori ekonomi Klasik. Keynes menegaskan bahwa perekonomian tidak selalu mencapai keseimbangan secara otomatis, sehingga intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif diperlukan untuk mendorong permintaan agregat dan mengurangi pengangguran (Keynes 1936).

Dalam kerangka Keynesian, peningkatan belanja pemerintah menghasilkan efek pengganda yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, kebijakan ini juga memiliki keterbatasan, seperti risiko inflasi dan ketidakseimbangan fiskal apabila diterapkan secara berlebihan (Blanchard 2009; Mankiw 2010).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersifat komparatif. Tujuan penelitian adalah membandingkan pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam tradisi ekonomi Islam klasik dengan pemikiran John Maynard Keynes dalam ekonomi modern konvensional, khususnya dalam aspek peran negara, kebijakan fiskal, dan mekanisme pasar. Sumber data primer yang digunakan adalah *Kitāb al-Kharāj* karya Abu Yusuf dan *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) karya John Maynard Keynes. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi buku teks dan artikel ilmiah yang relevan, seperti *Macroeconomics* karya Mankiw (2010) dan Blanchard (2009), serta jurnal-jurnal yang membahas ekonomi Islam dan ekonomi Keynesian.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dan analisis perbandingan dengan pendekatan *matrix coding*. Konsep-konsep utama dari kedua pemikiran diidentifikasi dan dikodekan berdasarkan indikator komparasi yang diturunkan dari tema kebijakan fiskal dan peran negara sebagaimana dibahas dalam sumber primer dan sekunder. Indikator tersebut meliputi: (1) landasan filosofis kebijakan fiskal, (2) peran dan legitimasi negara dalam perekonomian, (3) sumber dan instrumen pendanaan fiskal, (4) orientasi waktu kebijakan fiskal, serta (5) tujuan kebijakan ekonomi. Setiap indikator dianalisis secara sistematis dan disusun dalam bentuk matriks perbandingan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta implikasi normatif dari kedua pemikiran.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pemaparan konsep dalam karya Abu Yusuf dan Keynes dengan interpretasi dalam literatur ekonomi klasik dan modern yang relevan. Pendekatan komparatif ini digunakan untuk memastikan konsistensi analisis serta ketepatan penafsiran terhadap implikasi kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Komparasi Pemikiran Abu Yusuf

Dalam *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf menekankan cara mengelola uang negara yang didasarkan keadilan, kesejahteraan bersama, dan kestabilan keuangan. Beliau melihat Baitul Maal sebagai sesuatu yang dipercayakan oleh rakyat dan harus dikelola dengan baik agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Prioritas utama penggunaan uang negara adalah membangun perekonomian dan masyarakat yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat (Martina Nofra Tilopa 2017).

Prinsip-prinsip Belanja Publik menurut Abu Yusuf

- a. Kemaslahatan umum, Abu Yusuf menegaskan bahwa tujuan utama belanja negara adalah mewujudkan kemakmuran rakyat melalui pembiayaan infrastruktur publik seperti irigasi, jalan, dan fasilitas umum. Pengeluaran ini dipandang sebagai sarana peningkatan produktivitas ekonomi dan stabilitas sosial yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta penerimaan negara (Martina Nofra Tilopa 2017).
- b. Sumber pendanaan, belanja publik harus bersumber dari penerimaan negara yang sah dan berkelanjutan, seperti *kharāj*, *‘usyr*, zakat, serta pengelolaan aset dan sumber daya alam milik negara. Abu Yusuf menekankan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan pembiayaan negara dan mendorong optimalisasi sumber pendapatan internal sebelum menggunakan instrumen pembiayaan lainnya (Martina Nofra Tilopa 2017).
- c. Tanggung jawab penguasa, Abu Yusuf menegaskan bahwa penguasa adalah pemegang amanah yang wajib mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Larangan terhadap penyalahgunaan wewenang serta penekanan pada pengawasan administrasi menunjukkan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi utama kebijakan fiskal dalam pemikirannya (Agustiana dan Rofiah 2023).

Integrasi Pemikiran Fiskal Abu Yusuf dengan Maqāṣid al-Sharī'ah

Lebih lanjut, pemikiran fiskal Abu Yusuf dalam *Kitāb al-Kharāj* dapat dipahami secara komprehensif melalui kerangka maqāṣid al-sharī'ah. Kebijakan perpajakan yang adil dan proporsional mencerminkan upaya menjaga tujuan-tujuan utama syariat, khususnya perlindungan harta (hifz al-māl), kesejahteraan masyarakat (hifz al-nafs), serta stabilitas sosial dan ekonomi. Orientasi ini menunjukkan kebijakan fiskal tidak diposisikan semata sebagai instrumen ekonomi, melainkan sebagai mekanisme etis untuk mencegah kezaliman fiskal dan menjamin kemaslahatan publik. Temuan penelitian kontemporer menegaskan bahwa pendekatan maqāṣid dalam kebijakan ekonomi syariah menempatkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan publik (Hamka-Hamka dkk. 2024; Rahmayati, Suharto, dan Qosim 2023).

Kerangka maqāṣid al-sharī'ah tersebut, Abu Yusuf menekankan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan pembiayaan negara serta mendorong optimalisasi sumber penerimaan yang sah dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan orientasi jangka panjang kebijakan fiskalnya yang berfokus pada keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. Perspektif maqāṣid ini sekaligus menjadi pembeda utama dengan pendekatan fiskal Keynes yang lebih menekankan stabilisasi ekonomi jangka pendek melalui kebijakan defisit anggaran. Perbedaan orientasi tersebut tercermin secara jelas dalam tabel komparasi Abu Yusuf dan Keynes, di mana Abu Yusuf menempatkan kebijakan fiskal dalam bingkai etika dan kemaslahatan jangka panjang, sementara Keynes menekankan efektivitas kebijakan dalam mengatasi fluktuasi ekonomi jangka pendek.

Analisa Komparasi Pandangan Abu Yusuf Vs Keynes

Tabel 1. Analisis Komparatif: Abu Yusuf vs Keynes

Indikator	Pandangan Abu Yusuf (Abu Yusuf. 1979; Agustiana dan Rofiah 2023.; Martina Nofra Tilopa 2017)	Pandangan Keynes (Blanchard 2009; Keynes 1936; Mankiw 2010)
Filosofi Utama	Optimalisasi pendapatan sah, keadilan, dan kemaslahatan.	Akselerasi pembangunan, pembiayaan defisit.
Sumber Utama Pendanaan	Penerimaan negara yang adil dan berkesinambungan (Pajak, PNBPN).	Pinjaman untuk menutup defisit belanja infrastruktur.
Risiko Utama	Ketidakadilan dalam perpajakan, korupsi/inefisiensi penguasa.	Sustainability (keberlanjutan) fiskal
Peran Negara	Negara sebagai pengelola amanah yang adil dan transparan.	Negara sebagai aktor aktif stabilisasi ekonomi, terutama saat resesi.
Tujuan Fiskal	Kesejahteraan rakyat dan keadilan distribusi.	Pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran.
Orientasi Waktu Kebijakan	Jangka panjang: stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan.	Jangka pendek-menengah: pemulihan ekonomi dan stabilisasi siklus.

Berdasarkan tabel di atas, Abu Yusuf dan Keynes sama-sama melihat negara sebagai aktor penting dalam perekonomian, khususnya dalam pengelolaan belanja publik dan stabilitas ekonomi. Keduanya mengakui bahwa kebijakan fiskal berperan besar dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengatasi krisis. Perbedaan utama terletak pada orientasi kebijakan. Abu Yusuf lebih menekankan keadilan, amanah, dan keseimbangan jangka Panjang,

sedangkan Keynes menekankan penggunaan defisit sebagai alat utama untuk pemulihan ekonomi jangka pendek, khususnya saat resesi.

Akan tetapi, dari perspektif ekonomi Islam, pemikiran Abu Yusuf dan pendekatan Keynesian dipisahkan oleh batas normatif yang jelas. Dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah*, pemikiran Abu Yusuf menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen etis yang menekankan keadilan, amanah, dan tanggung jawab antargenerasi. Oleh karena itu, pendekatan Abu Yusuf relevan sebagai kerangka evaluatif normatif terhadap kebijakan fiskal modern agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kemaslahatan jangka panjang (Abu Yusuf. 1979; Blanchard 2009; Chapra 2008; Islahi 2015; Keynes 1936)

Implementasi Pemikiran Abu Yusuf Pada Ekonomi Kontemporer

Meskipun ditulis berabad-abad lalu, pemikiran Abu Yusuf tetap relevan dalam konteks ekonomi modern. Prinsip keadilan pajak yang menyesuaikan beban dengan kemampuan ekonomi mencerminkan dasar sistem pajak progresif kontemporer. Selain itu, penekanannya pada penggunaan pendapatan negara untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal modern dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Abu Yusuf juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara peran negara dan mekanisme pasar, di mana negara berfungsi sebagai regulator yang adil tanpa mendistorsi aktivitas ekonomi. Gagasannya mengenai optimalisasi pengelolaan aset negara agar produktif turut relevan dengan konsep manajemen aset publik masa kini. Dengan demikian, *Kitāb al-Kharāj* menunjukkan bahwa Abu Yusuf tidak hanya seorang ahli hukum, tetapi juga pemikir ekonomi visioner yang meletakkan fondasi bagi sistem keuangan publik yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang (Abu Yusuf. 1979; Hamka-Hamka dkk. 2024; Huda dan Muti 2011; Martina Nofra Tilopa 2017).

Implementasi Pemikiran Keynes Pada Ekonomi Kontemporer

Pemikiran Keynes tetap menjadi landasan penting dalam kebijakan ekonomi makro modern, khususnya dalam pengelolaan krisis dan stabilisasi ekonomi. Pendekatan ini diwujudkan melalui kebijakan fiskal ekspansif yang digunakan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi saat terjadi perlambatan, dengan mengandalkan mekanisme *multiplier effect*. Pengaruh Keynes juga terlihat dalam pengembangan model makroekonomi modern seperti AD-AS (*Aggregate Demand-Aggregate Supply*) dan *New Keynesian Economics*, yang menekankan adanya kekakuan harga dan upah sehingga pasar tidak selalu mencapai keseimbangan secara otomatis. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dan bank sentral dalam pengaturan suku bunga dan belanja publik dipandang perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek. Meskipun terus menjadi bahan perdebatan, pendekatan Keynesian tetap menjadi kerangka utama dalam perumusan kebijakan makroekonomi di banyak negara (Blanchard 2009; Keynes 1936; Mankiw 2010).

Implikasi dan Relevansi

Pemikiran Abu Yusuf menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal harus diawali dengan penguatan sistem pendapatan negara yang adil dan efisien melalui perpajakan. Prinsip keadilan pajak yang menyesuaikan beban dengan kemampuan ekonomi tetap relevan dalam konteks Indonesia, di mana optimalisasi sistem perpajakan berpotensi memperkuat kapasitas fiskal negara. Selain itu, penekanan Abu Yusuf pada transparansi dan akuntabilitas penguasa sejalan dengan tuntutan *good governance*, khususnya dalam pengelolaan belanja publik dan pembiayaan pembangunan agar memberikan *value for money* serta manfaat ekonomi dan sosial yang optimal. Temuan empiris di Indonesia juga memperkuat relevansi pemikiran tersebut, yang menunjukkan bahwa keadilan dan kualitas pelayanan pajak meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak, penerimaan pajak berfungsi sebagai pengontrol keuangan jangka panjang, serta efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara mencerminkan tanggung jawab dan fokus pada kepentingan masyarakat dalam kebijakan publik (Andreansyah dan Farina 2022; Mahendra dkk. 2024; Pramesti dkk. 2025; Rahmayati dkk. 2023).

Pemikiran Abu Yusuf dan Keynes dan relevansinya dalam Kebijakan Fiskal Indonesia

Dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia kontemporer, pendekatan Keynesian tercermin dalam penggunaan defisit APBN sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi, khususnya melalui peningkatan belanja negara yang sebagian besar dibiayai oleh utang. Strategi ini terlihat dalam pembiayaan pembangunan jangka pendek, subsidi energi berskala besar, serta stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun kebijakan tersebut efektif dalam menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi jangka pendek, dari perspektif pemikiran Abu Yusuf kebijakan fiskal berbasis defisit dan ketergantungan pada utang perlu dievaluasi secara normatif. Prinsip amanah dan kehati-hatian dalam pengelolaan Baitul Māl menuntut agar pembiayaan negara bersumber dari penerimaan yang sah, adil, dan berkelanjutan, serta tidak membebani generasi mendatang.

Selain itu, rendahnya rasio pajak (tax ratio) dan dominasi subsidi energi berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi manfaat fiskal, yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh karena itu, pemikiran Abu Yusuf memberikan kritik normatif terhadap praktik fiskal modern yang terlalu berorientasi pada stabilisasi jangka pendek ala Keynes, dengan menegaskan pentingnya keberlanjutan fiskal, keadilan distribusi, dan tanggung jawab antargenerasi sebagai tolok ukur utama kebijakan fiskal negara (Abu Yusuf 1979; Chapra 2008; Islahi 2015; Blanchard 2009; Keynes 1936).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa pemikiran fiskal Abu Yusuf dalam bukunya *Kitāb al-Kharāj* memandang kebijakan fiskal sebagai alat yang memiliki nilai etis, yang bertujuan mencapai keadilan, kesejahteraan bersama, serta kelanjutan pengelolaan keuangan. Pengelolaan pendapatan negara, khususnya melalui sistem perpajakan yang adil dan proporsional, dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip amanah dalam pengelolaan Baitul Māl menegaskan bahwa keuangan publik merupakan tanggung jawab moral penguasa untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar alat administratif negara.

Dalam perspektif komparatif, pendekatan Abu Yusuf berbeda secara normatif dengan pemikiran Keynesian yang lebih menekankan peran aktif negara dalam stabilisasi ekonomi jangka pendek. Meskipun kebijakan fiskal modern efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi, pemikiran Abu Yusuf menawarkan kerangka evaluatif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan keadilan distributif, tanggung jawab fiskal, dan orientasi kemaslahatan jangka panjang. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf tetap relevan sebagai landasan normatif dalam menilai kebijakan fiskal kontemporer, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena bersifat konseptual dan berbasis studi literatur tanpa menguji implikasi empiris pemikiran Abu Yusuf dan kebijakan fiskal Keynesian pada data fiskal aktual. Oleh sebab itu, generalisasi temuan bersifat terbatas dan terutama berfungsi sebagai kerangka normatif-analitis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan empiris, seperti analisis kebijakan fiskal atau data keuangan publik di negara berkembang, guna menguji relevansi dan aplikabilitas kerangka normatif Abu Yusuf dalam praktik kebijakan fiskal modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas selesainya artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi ilmiah dalam proses penyusunan studi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan studi ekonomi Islam dan kebijakan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Yusuf. 1979. *Kitāb al-Kharāj*. Beirut, Lebanon: Dār al-Ma'rifah.

- Agustiana, Lily Astrin, dan Khusniati Rofiah. 2023. *Mengupas Pemikiran Abu Yusuf Pada Zaman Klasik Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi di Indonesia*.
- Aisyah Dita Rizkia. 2025. "Mengupas Pemikiran John Maynard Keynes: Pilar Kebijakan Ekonomi Abad Ke-20 dan Peran Pentingnya di Era Modern."
- Al-Khatib al-Baghdadi. 2002. "Tārīkh Baghdād." dalam Vol. 1–24. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Muwaffaq al-Makki. 2013. *Manāqib Abī Hanīfah wa Aṣḥābih*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Andreansyah, Fiqi, dan Khoirina Farina. 2022. "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *jesya* 5(2):2097–2104. doi:10.36778/jesya.v5i2.796.
- Bakir, Ach. 2023. "Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak dan Relevansinya dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(01):371–77. doi:10.29040/jiei.v9i1.7824.
- Blanchard, Olivier. 2009. *Macroeconomics*: (5th. Ed). disunting oleh Pearson. New Jersey: International Edition.
- Calder, N. 1993. *Studies in Early Muslim Jurisprudence*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Chapra, M. Umer. 1992. "Islam and the Economic Challenge." Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer. 2008. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī‘ah*. Jeddah.
- Hallaq, W. B. 1997. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Hamka-Hamka, Muslimin Kara, Rahman Ambo Masse, dan Nahlah Nahlah. 2024. "Konsep Ekonomi Islam: Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept: Thoughts of Abu Yusuf." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7(1):25–35. DOI: 10.31949/maro.v7i1.5968.
- Huda, Nurul, dan Ahmad Muti. 2011. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Bogor: Ghailia Indonesia.
- Islahi, A. A. 1988. *Islamic Economics: A Short History*. disunting oleh Islamic Development Bank. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Islahi, A. A. 2015. *Islamic Economic Thought and Institutions*. disunting oleh Edward Elgar. Cheltenham, UK:
- Islahi, Abdul Azim. 2005. "Contributions of Muslim Scholars to the History of Economic Thought and Analysis upto 15th Century." disunting oleh Islamic Economics Institute. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Britania Raya.: Palgrave Macmillan.
- Mahendra, A., Elcy Handayani Pramita, Siti Raudhatul Jannah, Deli Zahara, dan Sever Ramapius Gulo. 2024. "Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Moderating di Indonesia." *Jesya* 7(1):336–47. doi:10.36778/jesya.v7i1.1462.
- Mankiw, N. G. 2010. *Macroeconomics*. Seventh Ed. US: Worth Publisher.
- Martina Nofra Tilopa. 2017. "Pemikiranekonomiabu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj." *AL-INTAJ* 3(1):154–71.
- Maruta, Heru. 2013. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. <http://www.hermaninbissmillah.blogspot.com/2009/11/pemikiran>.
- Nurseha, Muhammad Achid. 2018. "Abu Yusuf (Suatu Pemikiran) ABU YUSUF (Suatu Pemikiran Ekonomi)." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1(2).
- Pramesti, Retta Farah, Asno Azzawagama Firdaus, Khairanis Yulita, dan Mazraatin Thoyyibah. 2025. "Analisis Efisiensi APBN Era Prabowo: Kajian Ekonomi dan Analisis Sentimen Publik." *jesya* 8(2):1147–61. doi:10.36778/jesya.v8i2.2054.

-
- Rahmayati, Anggie Ika, Aisyiatu Shahiyah Suharto, dan Ahmad Qosim. 2023. “*Analisis Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Indonesia Tentang Merger Bank Syariah Bumh Menjadi Bank Syariah Indonesia.*” *Jesya* 6(1):782–93. doi:10.36778/jesya.v6i1.990.
- Timorita Yulianti, Rahmani. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*.
- Zuhayli, W. 2010. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus, Syria: Dār al-Fikr.